

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menganut asas desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam menyusun kebijakan di daerah masing-masing (Riduansyah, 2003). Asas desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah sehingga masing-masing daerah memiliki hak yang dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah termasuk dalam mengatur pajak daerah. Pemerintah daerah dalam merealisasikan otonomi daerah harus menyusun anggaran yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Realisasi dalam melaksanakan otonomi daerah didukung oleh kemampuan setiap daerah dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan sehingga menunjang pembangunan dan perkembangan pada masing-masing daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah. Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah yang dibebankan kepada masyarakat. Daerah dalam hal meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah berprinsip untuk mengoptimalkan pelayanan agar efektif dan tidak membebani masyarakat (Sutrisno, 2007). Dalam

mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan aplikasi, kualitas layanan, dan sosialisasi bagi wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak termasuk dalam kontribusi wajib kepada negara, di mana hal tersebut terutang oleh pribadi atau badan. Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban wajib pajak sebagai warga negara dalam membantu pembiayaan negara (Rachdianti et al., 2016). Mekanisme yang digunakan dalam mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dapat melalui sistem *official assessment*, *self-assessment*, dan *withholding system*. Pada mekanisme *self-assessment* wajib pajak terlibat secara langsung dalam menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang, besarnya pajak yang harus dibayar, membayar pajak, dan melaporkannya ke kantor pajak atau petugas pajak. Pemungutan pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa yang mana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan sebagai kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Penerimaan perpajakan menempati posisi pertama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan digunakan sebagai sumber dana dalam melakukan pembangunan di Indonesia tanpa terkecuali untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor.

Pemungutan pajak dibagi berdasarkan wewenangnya. Wewenang pemungutan perpajakan dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang digunakan sebagai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pajak

Daerah digunakan untuk keperluan daerah yang berasal dari kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Prabandaru, 2018). Pajak daerah dan retribusi daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dibagi menurut jenisnya yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk salah satu penerimaan daerah provinsi. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor sehingga mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.

Tabel I.1 Rekapitulasi Obyek Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
2017	2,334	96	978	29,959
2018	20,850	1,314	13,435	449,431
2019	22,588	1,186	13,544	473,039
2020	25,038	1,224	14,191	494,111
2021	28,642	1,737	15,986	520,274

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021b)

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kabupaten Kebumen dapat mempengaruhi secara langsung penerimaan PKB sehingga akan berpengaruh pada jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen. PAD berperan penting dalam kegiatan ekonomi daerah yang menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pembiayaan, dan pelaksanaan kekuasaan. Semakin besar persentase

penerimaan PAD terhadap penerimaan daerah menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber daya di daerah tersebut.

Tabel I.2 Realisasi PAD Kabupaten Kebumen (*Dalam Jutaan*)

TAHUN	NAMA REKENING				TOTAL
	Pajak	Retribusi	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah	
2017	Rp 68,427	Rp 800	Rp 3.35	Rp 15,573	Rp 84,803
2018	Rp 85,128	Rp 1,711	Rp 0.35	Rp 23,331	Rp 110,170
2019	Rp 92,347	Rp 1,810		Rp 20,039	Rp 114,196
2020	Rp 142,560	Rp 1,590		Rp 17,814	Rp 161,964
2021	Rp 190,412	Rp 65,254	Rp 171	Rp 1,601	Rp 257,438

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Komponen utama PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Tabel I.2 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dalam PAD Kabupaten Kebumen cukup besar. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan pelayanan yang tepat dalam memaksimalkan penerimaan daerah. Pemerintah merupakan fasilitator pelayanan publik yang dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan.

Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari yang mana membuat banyak aktivitas menjadi lebih mudah untuk dilakukan (Wahyudi & Sukmasari, 2018). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008), transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik

lainnya. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan pada setiap bentuk aspek aktivitas termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sebagai upaya mempermudah pelayanan kepada wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jawa Tengah menciptakan inovasi aplikasi yang bernama *New SAKPOLE* (Sistem Administrasi Pajak Online). Aplikasi *New SAKPOLE* merupakan hasil kerja sama antara beberapa instansi yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Polisi Daerah Jawa Tengah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja. Tujuan diciptakannya aplikasi *New SAKPOLE* antara lain dapat mengatasi permasalahan pembayaran pajak seperti terbatasnya waktu luang wajib pajak, dan mempermudah pembayaran serta pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari mana pun (Ulum, 2017).

Aplikasi *New SAKPOLE* tersedia di *Play Store* secara gratis dengan memanfaatkan *smartphone* berbasis android sebagai media dalam membayar pajak kendaraan dan pengesahan STNK (Budiman et al., 2021). Pengguna atau wajib pajak bisa membuka aplikasi di mana saja dan kapan saja dengan cara menekan tampilan pendaftaran *online* serta mengisi dan mengikuti petunjuk hingga muncul kode bayar. Kanal pembayaran PKB dalam aplikasi *New SAKPOLE* bisa dilakukan melalui *e-banking*, *mobile banking*, minimarket, dan beberapa *marketplace*. Bukti pembayaran berlaku 14 hari kerja sehingga wajib pajak bisa datang ke kantor

SAMSAT atau SAMSAT Keliling untuk menukar dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) asli dengan membawa STNK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dikenal sebagai suatu unit penyelenggara sistem administrasi di bawah naungan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yang mana berguna untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat di Indonesia. Keberadaan kantor SAMSAT di setiap kota/ kabupaten menjadikan SAMSAT sebagai pusat pembayaran pajak di masyarakat, termasuk pajak kendaraan bermotor. Secara konvensional, masyarakat memiliki banyak keterbatasan dalam membayar pajak, antara lain jarak dan waktu tempuh menuju kantor SAMSAT. Aplikasi *New SAKPOLE* merupakan salah satu terobosan pelayanan di Provinsi Jawa Tengah dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI *NEW SAKPOLE* TERHADAP CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KEBUMEN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan mengkaji dan mengulas beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran PKB dengan menggunakan aplikasi *New SAKPOLE*?

2. Bagaimana implementasi aplikasi *New SAKPOLE* di UPPD Kebumen?
3. Bagaimana tingkat pendapatan PKB di Kabupaten Kebumen?
4. Bagaimana faktor pendukung dalam implementasi aplikasi *New SAKPOLE*?
5. Bagaimana faktor penghambat dalam implementasi aplikasi *New SAKPOLE*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran PKB dengan menggunakan aplikasi *New SAKPOLE*.
2. Untuk mengetahui implementasi penerapan aplikasi *New SAKPOLE* di UPPD Kebumen.
3. Untuk mengetahui tingkat pendapatan PKB di Kabupaten Kebumen.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi aplikasi *New SAKPOLE*.
5. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi aplikasi *New SAKPOLE*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini penulis akan memfokuskan bahasan pada pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen mengenai penggunaan aplikasi *New SAKPOLE* di UPPD Kabupaten Kebumen dalam mendukung peningkatan PAD. Penulis juga membatasi analisis terkait implementasi *New SAKPOLE* ini pada transaksi di tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan landasan awal mula diterapkannya aplikasi *New SAKPOLE* dan adanya

pandemi Covid-19 di mana penggunaan teknologi lebih gencar dimanfaatkan. Capaian penggunaan aplikasi akan dilihat dengan cara membandingkan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan target penerimaan PKB serta melihat capaian penerimaan pajak dari aplikasi *New SAKPOLE*. Lokasi yang dipilih penulis adalah UPPD Kabupaten Kebumen karena pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan secara signifikan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kebumen.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya ialah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai aplikasi *New SAKPOLE* yang dirancang Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk diimplementasikan di UPPD Kabupaten Kebumen guna meningkatkan pelayanan agar tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga dapat dijadikan informasi tambahan bagi penulis dan masyarakat untuk mengetahui pelayanan berbasis elektronik yang terdapat di UPPD Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Mendapatkan pengetahuan mengenai mekanisme pembayaran PKB dengan menggunakan aplikasi *New SAKPOLE*.

- 2) Mendapatkan pengetahuan mengenai implementasi penerapan aplikasi *New SAKPOLE* di UPPD Kabupaten Kebumen.
- 3) Mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat pendapatan PKB di Kabupaten Kebumen.
- 4) Mendapatkan pengetahuan mengenai faktor pendukung dalam implementasi aplikasi *New SAKPOLE*.
- 5) Mendapatkan pengetahuan mengenai faktor penghambat dalam implementasi aplikasi *New SAKPOLE*.

b. Bagi UPPD Kabupaten Kebumen

Dapat menjadi bahan masukan dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi *New SAKPOLE*.

c. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pengetahuan kepada masyarakat yang membaca untuk melaksanakan pembayaran PKB dengan mudah dan cepat.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum mengenai latar belakang pemilihan judul dan topik karya tulis yang akan penulis ambil. Selain itu, penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta metode pengumpulan data yang relevan bagi penulis dalam penyusunan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori dan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai dasar dalam pembahasan topik karya tulis tugas akhir. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang data dan fakta yang terkait dengan objek penelitian. Teori dan fakta yang dikumpulkan pada bab ini berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi gambaran mengenai metode pengumpulan data yang relevan dengan objek penulisan karya tulis. Selain itu, pada bab ini juga tentang pembahasan mengenai data yang diperoleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang merujuk pada rumusan masalah guna mencapai tujuan penulisan karya tulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan penutup dari penyusunan karya tulis tugas akhir. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Aplikasi New SAKPOLE Terhadap Capaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen.